



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,17 persen (bps.go.id). PDB merupakan nilai pasar dari seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode. PDB dihitung berdasarkan jumlah dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, *net export*, dan diskrepansi statistik (bps.go.id). Berikut merupakan tabel komponen PDB pada tahun 2018:

Tabel 1.1
Komponen PDB 2018 (Triliun Rupiah)

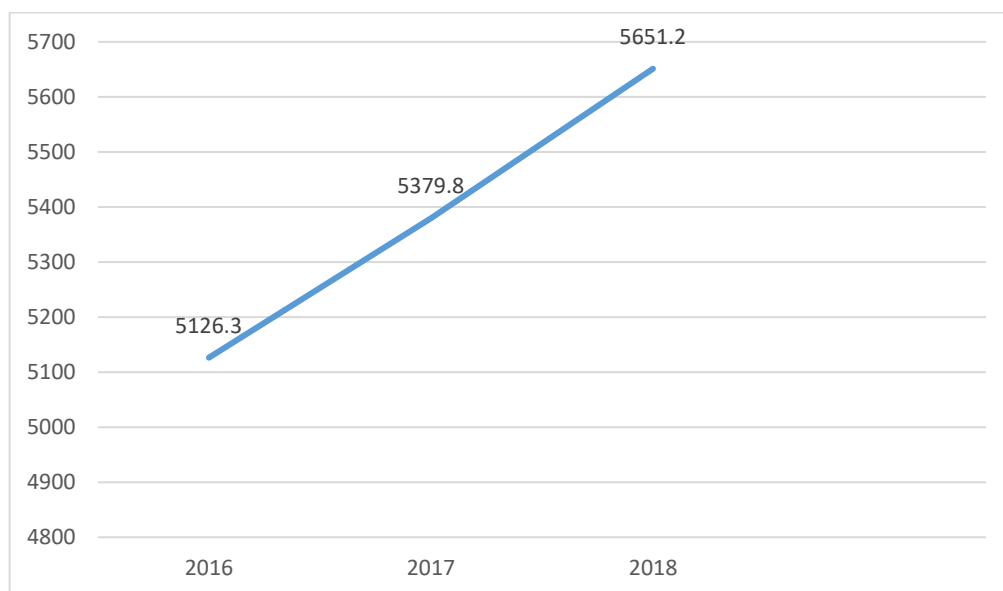
No.	Komponen PDB	2018
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.651,2
2.	Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT)	122,9
3.	Konsumsi Pemerintah	828,7
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.444,1
5.	Perubahan Inventori	197,4
6.	Ekspor Barang dan Jasa	2.285,9

7.	Impor Barang dan Jasa	2.201,1
Diskrepansi Statistik		96,2
Produk Domestik Bruto (PDB)		10.425,3

Sumber: bps.go.id, 2018

Konsumsi rumah tangga sebesar Rp 5.651,2 triliun memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur PDB, yaitu sebesar 54,21 persen dari total struktur PDB 2018 (bps.go.id). Konsumsi rumah tangga merupakan pembelanjaan rumah tangga berupa barang atau jasa, kecuali pembelian rumah baru. Konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut merupakan grafik peningkatan konsumsi rumah tangga.

Gambar 1.1
Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga (Triliun Rupiah)



Sumber: bps.go.id, 2018

Gambar 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 sebesar Rp 253,5 triliun atau 4,95 persen. Pada tahun 2018, peningkatan

jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp 271,4 triliun atau 5,04 persen. Peningkatan jumlah konsumsi rumah tangga didorong oleh pertumbuhan penjualan eceran. Pertumbuhan penjualan eceran dilihat melalui Indeks Penjualan Riil (IPR). Berikut merupakan tabel Indeks Penjualan Riil:

Tabel 1.2
Indeks Penjualan Riil

No.	Industri	2016	2017	2018
1.	Makanan, minuman, dan tembakau	217,5	235,1	256,5
2.	Perlengkapan rumah tangga	185	159,9	173,4

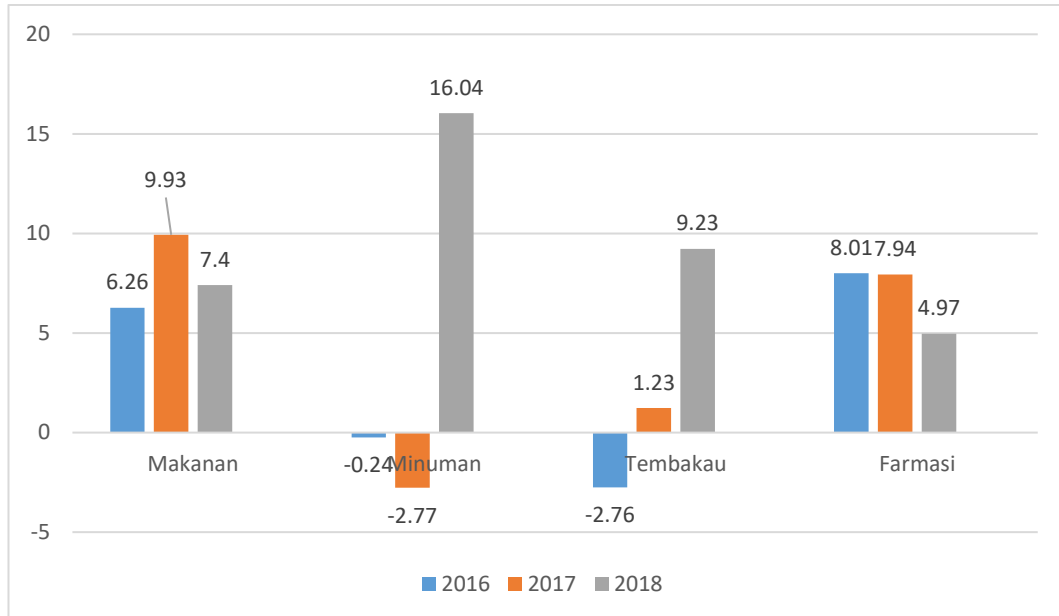
Sumber: bi.go.id

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2017, Indeks Penjualan Riil sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen. Namun pada tahun 2017, Indeks Penjualan Riil sektor perlengkapan rumah tangga mengalami penurunan sebesar 13,6 persen. Kemudian pada tahun 2018, Indeks Penjualan Riil sektor makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan sebesar 9,1 persen. Selain itu, pada tahun 2018, Indeks Penjualan Riil ada sektor perlengkapan rumah tangga juga mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen.

Pertumbuhan penjualan eceran berdampak pada peningkatan produksi barang manufaktur sektor barang konsumsi. Berikut merupakan tabel industri manufaktur sektor barang konsumsi yang mengalami peningkatan:

Tabel 1.3

Peningkatan Produksi Barang Konsumsi Tahun 2018 (persen)



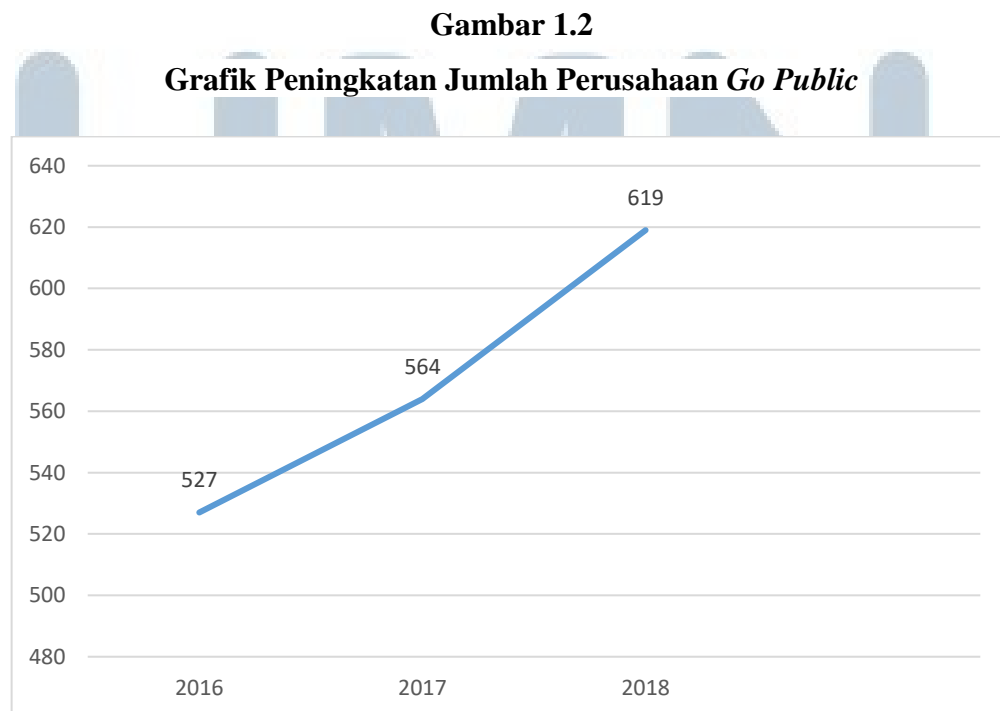
Sumber: bps.go.id, 2018

Produksi barang manufaktur yang mengalami peningkatan membutuhkan dana. Untuk mendapatkan dana tersebut, perusahaan melakukan *go public*. Perusahaan *go public* adalah perusahaan yang menawarkan dan menjual sebagian sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (Idx.co.id). Silondae, *et al* (2011) menyatakan bahwa dengan melakukan *go public*, maka perusahaan akan mendapat manfaat seperti:

1. Meningkatkan modal dasar perusahaan;
2. Memiliki catatan keuangan yang lebih baik dan tertib;
3. Meningkatkan perolehan keuntungan;
4. Pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba;
5. Citra perusahaan di masyarakat meningkat;
6. Memberikan likuiditas para pemegang saham sendiri;

7. Pemegang saham cenderung menjadi konsumen setia produk perusahaan;
8. Memungkinkan pendiri melakukan diversifikasi usaha;
9. Memungkinkan masyarakat untuk mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan tawar-menawar saham;
10. Mempermudah usaha pembelian perusahaan lain (ekspansi) dengan mencari dana dari lembaga keuangan tanpa melepaskan saham.

Selain itu, keuntungan menjadi perusahaan *go public* dari sisi perpajakan adalah perusahaan akan mendapatkan insentif pajak berupa penurunan tarif PPh Badan sebesar 5%, dari semula sebesar 25% menjadi 20%. Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tergambar dari peningkatan jumlah perusahaan di bursa efek dari tahun ke tahun. Berikut merupakan grafik peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan *go public*.



Sumber: www.idx.co.id

Berdasarkan Gambar 1.2, pada tahun 2017 jumlah perusahaan *go public* mengalami peningkatan sebanyak 37 perusahaan atau sebesar 7,02 persen. Kemudian, pada tahun 2018 jumlah perusahaan *go public* mengalami peningkatan sebanyak 55 perusahaan atau sebesar 9,75 persen. Dari 55 perusahaan yang melakukan *go public* pada tahun 2018, perusahaan manufaktur memiliki komposisi terbesar, yaitu sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 18,18 persen. Dari 10 perusahaan tersebut, komposisi terbesar merupakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi, yaitu sebanyak 4 perusahaan atau sebesar 40 persen.

Untuk mempertahankan minat *investor* agar bersedia berinvestasi pada perusahaan, maka perusahaan harus dapat mempertahankan tingkat pengembalian dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kinerja. *Investor* dapat melakukan penilaian kinerja melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dipublikasikan melalui *website* BEI. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian

kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut IAI (2017), karakteristik kualitatif fundamental laporan keuangan meliputi relevansi, yaitu informasi pada laporan keuangan dapat mengubah keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan, dan representasi tepat yaitu laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman merupakan karakteristik kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat. Hal ini menyebabkan laporan keuangan perlu disampaikan segera mungkin.

Bagi perusahaan, laporan keuangan bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu periode, menganalisa dampak dari kebijakan yang telah diambil oleh perusahaan pada periode tersebut, dan penyusunan strategi operasional untuk periode mendatang. Laporan keuangan memberikan informasi salah satunya yaitu laba dan dividen. Maka, bagi *investor* ataupun calon *investor*, laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempertahankan, menjual ataupun membeli saham. Bagi kreditor, laporan keuangan dijadikan sebagai dasar penilaian kemampuan perusahaan melunasi utangnya. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga dijadikan dasar pengambilan keputusan pemberian kredit terhadap suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, informasi dalam laporan keuangan mengenai pajak digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan harus memuat informasi yang akurat, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada publik harus di audit oleh auditor independen untuk meningkatkan keyakinan para penggunanya. Sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: KEP-346/BL/2011 mengenai Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun, jika perusahaan terlambat mempublikasikan laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan KEP-307/BEJ/07-2004 berupa:

1. Peringatan tertulis I

Diberikan atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Diberikan apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Diberikan apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lamanya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang telah ditentukan.

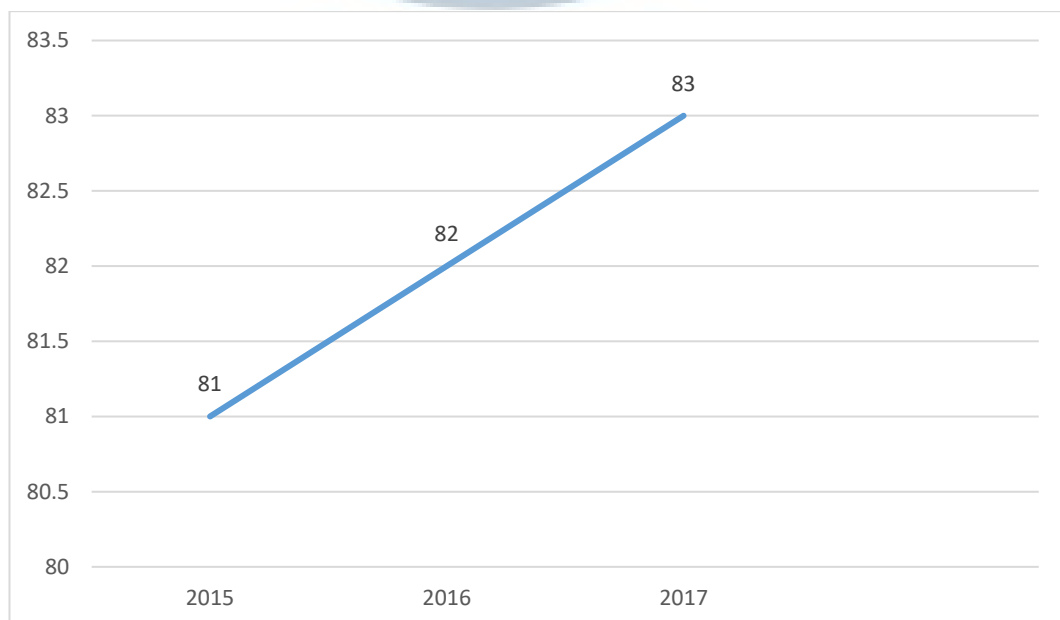
Lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan dipengaruhi oleh proses audit. Menurut Arens, et al (2017), proses audit meliputi tahap perencanaan dan perancangan pendekatan audit, pelaksanaan *test of control* dan *test* substantif terhadap transaksi, pelaksanaan prosedur analitikal susbtantif dan *test detail* saldo, serta penyusunan laporan yang membutuhkan kerjasama antara pihak auditor dengan manajemen perusahaan. Pada saat perencanaan dan pendekatan audit, auditor menerima klien dan melakukan perencanaan audit, melakukan prosedur analitikal awal, menentukan tingkat matrealitas, menilai risiko inheren, menyusun strategi audit serta rencana audit secara menyeluruh. Selain itu, sesuai dengan standar audit 315, auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material sebagai suatu dasar untuk merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko yang ditetapkan atas kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Kemudian pada tahap pengujian kontrol dan transaksi, auditor melakukan perencanaan untuk mengurangi risiko kontrol, melakukan pengujian kontrol, melakukan test substantif terhadap transaksi, dan menilai kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian pada tahap

pelaksanaan prosedur analitikal substantif dan test detail saldo, auditor melakukan prosedur analitikal substantif, melakukan test pada akun-akun utama, dan melakukan test detail saldo. Pada tahap terakhir, yaitu tahap penyusunan laporan audit, auditor melakukan test tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, mengakumulasi bukti akhir, evaluasi hasil, mengeluarkan laporan audit dan mengkomunikasikannya dengan komite audit serta manajemen.

Lamanya waktu yang diperlukan auditor untuk mengaudit laporan keuangan yang dihitung sejak tanggal tutup buku laporan keuangan hingga tanggal yang tertera pada laporan audit disebut dengan *audit delay*. Berikut merupakan grafik rata-rata rentang waktu *audit delay* sektor konsumsi:

Gambar 1.3

Grafik Peningkatan Rata-Rata Rentang Waktu *Audit Delay*



Sumber: www.idx.co.id

Rata-rata rentang waktu *audit delay* mengalami peningkatan sebanyak 1 hari pada tahun 2016, kemudian kembali mengalami peningkatan sebanyak 1 hari pada tahun

2017. Panjangnya *audit delay* dapat memicu keterlambatan pada publikasi laporan keuangan, seperti contoh pada PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) yang memiliki rentang waktu *audit delay* selama 251 hari yang menyebabkan terlambatnya penyampaian laporan keuangan tahun 2013. Hal ini disebabkan karena *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* yang mengaudit PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN) dan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), menemukan penyimpangan pada laporan keuangan PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), yang merupakan grup dari PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN). Hal ini menyebabkan PwC melakukan perluasan *sampling* terhadap pemeriksaan laporan keuangan BORN sehingga proses audit yang dilakukan semakin panjang (investasi.kontan.co.id).

Banyaknya faktor yang mempengaruhi *audit delay* menyebabkan penelitian mengenai *audit delay* ini penting. *Audit delay* dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain solvabilitas, profitabilitas, opini audit, ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini, solvabilitas diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Debt to Equity Ratio* mengukur seberapa besar proporsi utang jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika perusahaan memiliki *DER* yang semakin rendah, artinya jumlah utang yang dimiliki perusahaan semakin rendah. Hal ini menyebabkan risiko gagal bayar perusahaan juga semakin rendah sehingga auditor tidak perlu melakukan perluasan lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan *sample* untuk

menemukan bukti audit. Hal ini menyebabkan *audit delay* yang semakin pendek. Hal ini terbukti oleh Widhiyani dan Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Aditya dan Anisyukurillah (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara solvabilitas dengan *audit delay* karena semua perusahaan akan berusaha dengan cepat untuk mempublikasikan laporan keuangannya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset Ratio (ROA)*, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. *ROA* yang tinggi artinya perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, maka perusahaan dinilai memiliki pengendalian internal yang baik atas aset. Hal ini menyebabkan risiko pengendalian perusahaan semakin rendah sehingga auditor tidak perlu melakukan perluasan lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan *sample* untuk menemukan bukti audit sehingga menyebabkan *audit delay* yang semakin pendek. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Suparsada dan Putri (2017) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena perusahaan yang memiliki kenaikan *profit* akan mempercepat publikasi laporan keuangannya. Namun berbeda dengan penelitian Pitaloka dan Suzanl (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat profitabilitas dengan *audit delay*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki *audit delay* yang

panjang pula karena jika *profit* atau laba perusahaan semakin besar, maka lingkup penugasan audit akan semakin luas pula pengujian yang dilakukan oleh auditor.

Opini audit adalah kesimpulan auditor mengenai hasil audit. Opini audit dibedakan menjadi wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adverse*) dan tidak memberikan pendapat (*disclaimer*). Laporan keuangan bagi perusahaan yang menyajikan seluruh laporan keuangannya, dalam hal material, sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam penelitian ini, opini audit diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu jika perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka masuk dalam kategori 1. Namun jika perusahaan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dari auditor, maka masuk dalam kategori 0.

Jika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, artinya auditor menyimpulkan bahwa perusahaan telah menyajikan seluruh laporan keuangannya, dalam hal material, sesuai dengan kerangka laporan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik sehingga risiko pengendalian perusahaan semakin rendah. Selain itu, auditor telah menemukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari opini yang menyebabkan auditor tidak perlu melakukan perluasan lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan *sample* yang berdampak pada *audit delay* yang semakin pendek. Hal ini didukung dengan penelitian Aryaningsih dan Budiarta (2014), ketika auditor memberikan opini selain *unqualified opinion* terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka

audit delay yang dilakukan akan terindikasi semakin panjang karena ketika perusahaan mendapatkan opini selain *unqualified opinion* maka auditor akan mencari bukti-bukti penyebab dikeluarkannya opini selain *unqualified opinion*. Pencarian bukti-bukti serta temuan-temuan audit akan memakan banyak waktu sehingga mengindikasikan terjadinya *audit delay* yang panjang. Hal ini berbalik dengan penelitian Zebriyanti dan Subardjo (2016) yang mengatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh pada *audit delay* karena proses pemberian pendapat terhadap kewajaran suatu laporan keuangan merupakan tahap akhir dalam proses audit, sehingga jenis opini apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi lamanya *audit delay* yang terjadi. Selain itu, auditor akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menghadapi setiap kondisi perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari jumlah aset perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar artinya jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin banyak. Ketika jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin banyak, artinya semakin kompleks standar operasional prosedur perusahaan terkait dengan penggunaan aset dalam melakukan kegiatan operasional. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik sehingga risiko pengendalian perusahaan semakin rendah. Hal ini menyebabkan auditor tidak perlu memperluas lingkup audit serta tidak adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan *sample* untuk menemukan bukti audit sehingga berakibat pada *audit delay* yang semakin pendek. Hal ini terbukti oleh penelitian Ningsih dan Widhiyani

(2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *audit delay* dengan ukuran perusahaan, karena perusahaan yang besar cenderung memiliki audit internal yang lebih berpengalaman daripada perusahaan kecil. Sedangkan penelitian Widhiasari dan Budiarta (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *audit delay* dan ukuran perusahaan karena semakin besar aset perusahaan, maka sampel yang diambil semakin banyak serta prosedur auditnya semakin panjang.

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan menjalankan operasinya sejak berdiri hingga saat ini. Dalam penelitian ini, umur perusahaan diukur dengan selisih antara tahun perusahaan tersebut terdaftar di BEI dan tahun penelitian. Semakin lama perusahaan berdiri, artinya semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan untuk menyempurnakan standar operasional prosedur menjadi lebih kompleks yang menyebabkan kegiatan operasional perusahaan semakin efektif dan efisien, membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, serta mengurangi risiko *fraud* sehingga perusahaan dinilai memiliki pengendalian internal yang semakin baik. Hal ini menyebabkan risiko salah saji dan risiko pengendalian perusahaan akan semakin rendah sehingga auditor tidak perlu memperluas lingkup audit sehingga tidak adanya penambahan prosedur audit yang salah satunya dapat berupa penambahan *sample* untuk menemukan bukti audit yang cukup dan tepat. Hal ini menyebabkan *audit delay* yang semakin pendek. Hal ini terbukti melalui penelitian Saemargani (2015), umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* karena perusahaan yang memiliki umur lebih lama dinilai lebih mampu dan terampil dalam mengumpulkan, memproses, dan

menghasilkan informasi pada saat yang diperlukan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki umur lebih lama memiliki lebih banyak pengalaman. Sedangkan penelitian Lianto dan Budi (2010) dalam Widhiasari dan Budiarta (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri memiliki banyak cabang atau usaha baru, tidak hanya di beberapa daerah namun juga sampai ke luar negeri. Perusahaan dengan umur yang lebih tua cenderung memiliki bisnis yang lebih kompleks yang menyebabkan *audit delay* semakin panjang.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Amariyah, dkk (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini menambah 2 variabel independen baru yaitu, opini audit dan ukuran perusahaan (Pitaloka dan Suzanl, 2015).
2. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Amariyah, dkk adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2015-2018, sedangkan penelitian Amariyah, dkk dilakukan dari tahun 2013-2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap *Audit Delay***”.

1.1 Batasan Masalah

Penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada pengaruh solvabilitas, profitabilitas, opini audit, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Solvabilitas diproksikan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*.
3. Profitabilitas diproksikan dengan menggunakan *Return on Asset Ratio (ROA)*.
4. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *log Total Asset*.
5. Faktor umur perusahaan diukur berdasarkan tahun perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun penelitian.
6. Objek penelitian adalah perusahaan subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah solvabilitas yang berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas yang berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif dari solvabilitas terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh negatif dari profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh negatif opini audit terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
5. Pengaruh negatif umur perusahaan terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi auditor dalam melakukan perencanaan audit agar kinerja auditor semakin efektif dan efisien dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. *Investor*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para regulator pasar modal seperti OJK untuk membuat regulator mengenai

pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

4. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

5. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi *audit delay*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan tentang laporan keuangan, laporan audit, *audit delay*, solvabilitas, profitabilitas, opini audit dari berbagai literatur, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terkait dengan pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian mulai dari analisis, hasil pengujian hipotesis, dan penjelasan secara teoritik maupun kuantitatif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban dari masalah dan tujuan penelitian serta informasi tambahan yang didapatkan dari hasil penelitian. Selain itu, dipaparkan pula keterbatasan yang dialami selama penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA